

PANCASILA, PRIMORDIALISME DAN *RELIGIOUS-MINDEDNESS*.

Anas Saidi

*Deputi UKP PIP (Unit Kerja Presiden
Pembinaan Ideologi Pancasila)*



Beragam isu primordial, anti asing, konservatif dan beragam istilah yang menunjukkan pergeseran arus begitu mudah muncul dan mendapat banyak support. Bagaimana ideologi Pancasila sebagai bagian dari kesepakatan para pendiri republik menghadapi situasi di atas?

Edisi ini Jurnal Afkar berkesempatan bincang soal Pancasila dengan unit kerja baru yang dibuat Presiden, yakni UKP PIP (Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila). Anas Saidi selaku Deputi UKP PIP

Apa mandat utama yang diberikan Presiden kepada Unit ini?

Kalau bicara mandat UKP PIP (Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila), yang lebih *afdhol* berkomentar adalah ketua, yang tahu detail *asbabun muzulnya*. Saya hanya menafsirkan dan

menduga saja. Kira-kira setiap negara itu membutuhkan sebuah dewan ideologi, dalam tanda kutip. Dewan penasehat bidang ideologi, dan bagi Indonesia bisa lebih dari itu, terlebih di negeri yang luas, kepulauan, multi etnik atau SARA. Kesepakatan ideologi Pancasila yang merupakan hasil dari proses kesepakatan para pendiri negeri ini selalu megalami dinamika dalam setiap periode.

Hari ini ancaman ideologi negara sudah begitu mengkhawatirkan, pancasila sebagai fungsi integrasi nasional, pandangan hidup dan lainnya, sedang mengalami siklus guncangan. Bisa jadi ini musiman dalam kurun waktu tertentu, atau rasa bosan, frustrasi dan gagal menghadapi situasi, menuju pada pengulangan sejarah, muncul pertanyaan yang hampir sama dengan masa lalu terkait efektifitas ideologi Pancasila. Dari sinilah kehadiran dewan

ideologi UKP PIP ini menemukan relevansinya.

Dalam pola *keajegan* atau musiman, bahkan orang-orang bisa mengatakan banyak kasus di negeri ini dalam periode tertentu berulang dan timbul konflik, semisal Solo, atau Kalimantan Barat. Jadi laten yang kemudian ada pattern-nya. Ujung-ujungnya selalu berkisar pada primordialisme. Nah, sekarang ikatan primordialisme dalam konteks politik keagamaan itu menemukan satu momentum yang sangat telanjang yaitu kasusnya Pilkada DKI Jakarta yang lalu.

Kalau kita *ngomong* tentang Ahok, sebetulnya dalam konteks demokrasi, tidak ada yang bisa dilarang baik dalam etnis maupun lainnya. Kecuali politik identitas keagamaan itu, atau dalam konteks identitas primordial yang menjadi primordialisme. Kalau kita bicara primordial menggunakan kata Amy Gutmann, dia melihat dalam 3 kategori, ada yang *good* ada yang disebut dengan *bad* dan ada yang disebut dengan *ugly*. Jadi kalau yang *good* ini kaya NU itu, dia tidak lagi mempersoalkan ideologi Pancasila tapi sekaligus mempromosikan sesuatu pendekatan yang tawasut, tasamuh, moderasi dan seterusnya. Jadi mengajak bahwa ikatan primordial itu tidak menjadi isme. Tapi yang disebut *bad*, itu adalah dia mengatakan bahwa dirinya yang paling baik tapi tidak sampai menyerang kepada ideologi yang berbeda, jadi tidak ada takfiri, tidak mengkafir-kafirkan orang dan segala macam. Yang *ugly* itu yang paling berbahaya, pertama sudah merasa dirinya

benar lalu menyerang kelompok lainnya, *plus* dia mau menggugurkan ideologi yang disebut *common platform* yaitu pancasila tadi. Jadi sebenarnya dalam konteks itu kenapa HTI dibubarkan, karena HTI dalam kategori *ugly* itu membahayakan persatuan.

Dalam konteks itu lalu orang mempersalahkan, Banyak orang ahli hukum yang mengatakan apa yang dilakukan presiden itu adalah bertentangan dengan UUD '45. Itu nanti NU bisa dibubarkan, ini bisa dibubarkan kalau tidak sesuai dengan Pancasila, apalagi dengan pernyataan Egi Sujana yang terakhir itu.

Saya mengikuti pembelaan-pembelaan mereka yang tidak setuju dengan presiden itu antara lain mengatakan, jadi kalau nanti setiap ormas yang bertentangan, mau mengganti Pancasila, mau mengganti UUD '45, maka bisa dibubarkan, dia *ngomong* kalau begitu orang-orang yang mau melakukan amandemen itu bisa ditangkap dan dibubarkan, menurut saya itu *lebay*, yang dimaksudkan mengganti UUD '45 bukan dalam pengertian memperbaiki, tapi dalam bentuk ilegal. Nah ini yang saya kira menjadi pesan UKP PIP.

Lantas bagaimana UKP ini merespon berbagai kelompok-kelompok yang beragam di masyarakat?

UKP PIP itu menjaga apa yang kita sebut dengan ideologi Pancasila sebagai sesuatu yang sudah sedemikian

rupa. Inilah satu-satunya ideologi yang kemudian menjadi satu perekat, menjadi yang disebut *common platform*, jadi menjadi *conditio sine qua non* jadi prasyarat yang harus ada bagi Negara yang plural seperti Indonesia itu. Jadi kalau mau dibesar-besarkan, kita jelas tidak mungkin bisa hidup tanpa Pancasila, meskipun kemaren saya kira pernyataan Egi itu membikin semua orang marah. Nah konteks ini, ternyata menurut saya kita terlambat. Sebab proses perongrongan pada ideologi Pancasila itu sudah sedemikian lama melalui apa yang *difikih siyasah* atau kelompok *Islam daulah* itu dalam berbagai kadarnya. Bahkan menurut saya yang agak merisaukan, karena kelompok-kelompok *mainstream* baik NU maupun Muhammadiyah yang disebut sebagai penjaga Pancasila itu mengalami apa yang disebut oleh Martin van Bruinessen sebagai *conservative turn*. Riil secara sosiologis ada NU rasa PKS, ada NU rasa HTI, ada NU rasa nano nano dan seterusnya itu. Dan saya kira kalau kita auto kritik misalnya, MUI di seluruh Jawa Timur itu *gak* ada satupun yang tidak dari NU, tapi seluruhnya menyetujui tentang kasus yang ada di Sampang dengan Syiahnya, kecuali hanya satu di Bondowoso. Meskipun kalau ditanya ke NU itu yang dipilih kebetulan orang-orang yang tidak NU sesungguhnya, tapi bayang bayang NU.

Nah, apa yang mau saya katakan, sudah terlalu banyak contoh-contoh, baik yang di kampus, di masyarakat sipil, di rumah, atau dimana saja dan yang

terakhir kemaren kita diskusi dengan peneliti dari Singapura, menurutnya sudah 39 persen masyarakat di Indonesia layak didefinisikan pada kecenderungan konservatif. Kalau itu yang terjadi, artinya kita sudah masuk stadium 3 menuju ke 4. Jadi kalau ini tidak cepat dilakukan lalu kita membutuhkan strategi seperti apa yang harus dilakukan untuk mengembalikan pada kesadaran kebhinnekaan, *tawassuth-tasamuh*, mengembalikan kepada sikap moderat, mengembalikan kepada *alhurriyah*, bagaimana kesetaraan *syuro bainahum* bagaimana demokrasi itu menjadi musyawarah-mufakat dan seterusnya itu. Ini saya kira menjadi tantangan besar dan harus jujur yang moderat di lembaga lain itu bisa di lokalisasi dalam NU apalagi Muhammadiyah.

Kalau Banser itu sudah agak mempunyai *trademark* bahwa mereka kelompok yang moderat. Hal berikutnya yang menghawatirkan, karena respon mereka yang dalam kepentingan fundamentalisme itu, ternyata menggunakan sistem yang kita gunakan. Mereka juga berbicara Pancasila, menyuguhi Pancasila, Bhinneka tunggal ika, UUD '45, dengan penggunaan strategi baru (Pancasila bersyariah) dan lain sebagainya.

Nah padahal sebenarnya, kita jujur sampai hari ini ruang wacana itu belum seluruhnya bisa kita jinakkan, maksudnya begini satu contoh yang agak riil. Kasus Ahok, terjadi 212 dan segala macam, semua mengatakan jangan memilih orang yang non muslim atas dasar al-Maidah 51, meskipun kalimah

awliya itu bisa dimaknai teman karib dan apapun. Namun, apapun tafsirnya tetapi dalam fakta sosiologisnya, kampanye itu kemudian berhasil, Ahok tumbang, rasionalitas politik digeser oleh politik identitas keagamaan. Nah kayaknya ini, model seperti ini sudah akan digulirkan terus oleh kelompok-kelompok itu untuk menjadi model. Mungkin nanti akan dicoba di Jawa Barat, mungkin akan ini jadi *test case* dan seterusnya. Menurut saya satu sinyal yang kemudian harus dibaca bahwa ternyata politik identitas keagamaan itu relatif berhasil menggeser rasionalitas politik, dulu itu tidak terjadi.

Saya bisa *ngasih* contoh tahun 2009, kalau tidak salah jamannya pak SBY atau 2014 saya lupa. Ada di DIY, didalam survey itu mengatakan kelompok menengah yang berpenghasilan 10 juta ke atas itu, kelompok menengah itu ada 60% mengaku NU, baik dia merasa simpatik atau mengaku NU, tetapi survey memang tidak mendeteksi karena apanya? Mungkin saja mau ditahlili, mungkin bapaknya NU atau apapun namanya itu. Tapi yang menarik mereka tidak ada yang memilih partai NU. Artinya, secara agama dia “tradisionalis” tapi secara pilihan politik dia rasionalis. Nah menurut saya ini kemudian dijawab secara berbeda dengan kasus Ahok, itu baik secara rasional maupun identitas, itu menjadi sangat tradisionalis. Ini kan pergeserannya cukup luar biasa. Apa yang ingin saya sampaikan, ternyata *conservative turn* yang disampaikan Martin itu sudah terjadi, bukan lagi akan terjadi. Bukan hanya di kalangan NU,

tapi juga di kalangan lain.

Tapi menurut saya, akhir-akhir ini Alhamdulillah pak Kiai Amin itu sudah *distingtif*, dia berdiri dalam kelompok yang berbeda tegas, kalau dimasa lalu orang masih risau, sekarang *nggak*. Jadi saya kira ini poin besar karena dukungan MUI itu sangat signifikan untuk melakukan penguatan moderatisme. Kita harus sadar bahwa model dari proses pemahaman keagamaan yang sekarang dipetik itu, menurut saya adalah hasil dari yang sekian lama dilakukan. Era instan banyak yang hanya ingin ‘eksis’ dan ‘narsis’, sehingga yang laku di pasaran juga tokoh-tokoh instan, yang tak jarang secara kapasitas belum memadai untuk menjadi tokoh atau ustadz yang layak diteladani, baik melalui media sosial atau TV.

Tak sedikit kalangan kelas menengah, kalangan mahasiswa yang *vacuum* terhadap sosialisasi Pancasila, belajar agamanya juga pada kelompok-kelompok instan itu, akibatnya dia tidak punya *sense* terhadap pesantren sehingga akhlaknya tidak ada. Dengan kiai *ngomong ndasmu* dan segala macam kegagapan itu, kiai *picek* dan seterusnya. *Kan* kurang ajar *banget*, mana ada di pesantren berani seperti itu. Jadi inilah tantangan terbesar terhadap apa yang kita sebut dengan proses sosialisasi bagaimana Pancasila dan Islam itu dikembalikan konteksnya. Apa yang dilakukan Lakpesdam itu saya kira sangat tepat sekali, mengembalikan moderasi.

Sekali lagi, ini saya kira membutuhkan satu tradisi untuk memerangi *kekadungan*

sebuah keterlanjuran. Saya kira sekarang ini sudah hampir tidak punya banyak waktu, sudah begitu terlambat, namun harus diupayakan maksimal. Lihat saja seluruh perguruan tinggi yang terkenal seperti UI, ITB dan segala macam, hampir seluruhnya dewan mahasiswa, BEM itu gak ada yang cenderung moderat. Yang banyak konservatif, seperti model KAMMI.

Apakah ada faktor yang melatari soal kebosanan generasi ini? Bahkan mereka lebih enjoy untuk belajar khilafah, dan mereka mudah dibelokkan dengan kajian ekstrem, apakah soal sajian yang harus lebih kreatif?

Memang kalau khusus anak muda, ada sebuah fase yang relatif kosong, generasi yang lahir pada akhir 80an dan terutama lagi 90an itu kan *nyaris* tidak pernah diperkenalkan dengan Pancasila. Tidak ada pelajaran Pancasila, sejarah perdebatan para pendiri negara, perdebatan asas tunggal, bahkan mereka punya peluang untuk menyatakan bahwa asas yang harus dipegang itu adalah Islam dan segala macam turunannya.

Berikutnya, melihat dalam aspek regulasi bagaimana? Misalnya soal Perppu yang berubah jadi UU ormas, itu agak alot untuk menerima Pancasila dan sampai hari ini *kan* menjadi satu problem. Semua itu menandakan betapa tidak mudahnya mengembalikan setelah lama *vacuum*. Kalau dulu dalam bahasa asas tunggal yang jauh lebih dahsyat, tapi sekarang lebih pada pentingnya

common platform, jalan tengah, *middle way*, *khoirul umur ausatuha*. Selain kefakuman, sebab berikutnya ditangkap oleh proses islamisasi yang sangat *well organized* melalui kampus-kampus, bahkan proses itu kemudian dikunci oleh *bai'at*. Banyak orang yang baru masuk, lalu disumpah kalau melanggar ini dan segala macam, diikuti hingga setelah bekerja sampai hari ini. Jadi saya kira agak susah untuk menandingi mereka, kalau kita tidak *well organized*, sementara kelebihan dan kekurangan NU itu *kan* kurang *well organized*.

Ada faktor soal ekonomi?

Terlalu banyak bukti yang mengatakan bahwa faktor ekonomi itu menjadi faktor dominan untuk melakukan, mungkin saja *iya*, tapi kalau kita *ngomong* tentang *life historis* terhadap sejarah orang-orang militan terutama di Inggris dan tempat lain, rata-rata itu kelompok kelas menengah yang kaya-kaya. Di Pakistan, anak dokter, anak orang kaya. Maka dalam konteks itu tidak semua motif ekonomi, tapi ideologi. Betapapun faktor ekonomi memainkan peran penting, saya akan berani mengatakan bahwa ideologi yang lebih dominan. Dengan kata lain, tidak ada jaminan kalau kita berhasil mengentaskan kemiskinan akan dengan sendirinya, kelompok-kelompok ini menjadi moderat.

Banyak kalangan menyebut jargon kesejahteraan itu dipakai oleh kelompok tertentu untuk menihilkan peran Pancasila?

Saya pernah diundang dalam salah satu ceramah jambore mahasiswa. Saya diminta berbicara tentang Pancasila dan agama khususnya Islam, saya cerita tentang masalah di atas. Ada 15 pertanyaan saya hitung, 9 secara langsung atau tidak langsung mengatakan membela HTI. Bahkan satu orang *ngomong* pak sudah waktunya diganti, Pancasila itu kan gagal, saya dari Aceh, kemiskinan dimana-mana, ini sudah waktunya diganti oleh HTI sebagai ideologi baru, sambil teriak Allahu Akbar. Itu level mahasiswa yang persentuhan pemahamannya mustinya lebih banyak dan terbuka.

Nah, saya lanjut bicara sekarang bagaimana harus dijawab Indonesia itu adalah Negara muslim terbesar di dunia, korupsinya juga *number one* di seluruh Asia. Ada hadits *ngomong* sogok-menyogok itu kedua-duanya masuk neraka. Kenapa korupsinya terbesar? Dan kalau ditangkap masih *ketawa-ketiwi* merasa tidak bersalah. Apakah dengan begitu Islam harus diganti? Apakah Islam harus diganti karena gagal memerangi korupsi (kebanyakan yang ditangkep muslim-red). Dia tidak bisa menjawab dan kemudian juga kayak mengalami kebingungan, jadi mulai sadar. Tetapi yang ingin saya sampaikan, dia didahului oleh sebuah pengetahuan tentang khilafah, di situ ada *hope*, harapan-harapan yang dijanjikan seperti jamannya Nabi, seperti jamannya Khulafaurrasidin, seperti jamannya Abasiyah dan segala macam.

Sebenarnya, ada sesuatu hal yang

harus diklarifikasi dalam ruang-ruang di kalangan kelompok muda itu, dan tentu saja kampus-kampus umum. Saya dengar dia melakukan suatu kebijakan pelajaran agama tidak diberikan pada semester pertama, tapi pada semester ke lima dengan harapan mereka sudah punya perbandingan. Jadi Islam tidak hanya menjadi monolitik. Hanya HTI dan ikhwanul muslimin yang boleh bebas. Jadi, proses yang menarik adalah, dia lebih masuk pada ruang akademik, ada kontestasi gagasan orang dari beragam latar belakang. Khilafah, kemudian minggu depan bicara tentang masalah kesetaraan, dan lain-lain. Jamaah diajak berfikir untuk membandingkan secara akademik. Kabarnya ini masih dalam proses di UGM. Layaknya perang wacana, lalu siapa yang masuk akal di dalam ruang akademik. Jadi mahasiswa dididik untuk berfikir bukan hanya benar-salah, *nggak* boleh egois seperti itu.

Saya suka dengan kalimatnya Dr. Yudi Latif, Ketua UKP PIP, “gelap itu jangan dilawan dengan gelap, tapi harus dilawan dengan sinar, jadi kita jangan mengikuti irama musik mereka, kita tidak usah melayani apa yang dikatakan mereka, tapi kita menciptakan panggung sendiri yang memberikan sebuah alternatif pencerahan. Dengan sendirinya rakyat memiliki proses, mencerdaskan dan memilih bahwa toleransi ternyata lebih baik.”

Mohon maaf aja ini, dengan fakta Riziq gak pulang, itu kan banyak orang merasakan bahwa ternyata enak

banget, *nggak* ada huru-hara, dan segala keributan lainnya. Jadi, orang merasakan, ada satu proses yang membawa pada satu kesadaran.

Kalau saya ditanya lebih detail, kalau begitu apa yang harus dilakukan? Setiap lokalitas membutuhkan strategi tersendiri. NU juga perlu strategi tersendiri. Misalnya begini, di Jawa Tengah, ketika saya melakukan penelitian Ahmadiyah, seluruh NU menyetujui pembangunan mesjid Ahmadiyah di jalan Airlangga. Padahal di Jatim, NU menolak. Kebetulan di sana masyarakatnya kebanyakan Tionghoa dan juga menyetujui. Tapi sebenarnya, katanya sebab utamanya karena Gus Mus yang marah kepada tanfid di tingkat cabang, “Kamu itu *ngurusi* diri sendiri aja belum bisa, sudah *ngurusi* orang lain”. Gambarnya begitu. Jadi, toleransi tadi atas kewibawaan Gus Mus, bukan dalam kesadaran yang bersifat kolektif.

Sementara di Jawa Timur, *nggak* ada orang yang seperti itu. Problemnya menjadi corak kepemimpinan. Kalau kemudian memberikan pencerahan kepada kalangan gus-gus, itu salah satu cara. Tapi menurut saya, cara lain juga harus dijawab dengan teks, ada bukunya pak Masdar tentang konstitusi, dan banyak buku lainnya yang sangat piawai sekali menjelaskan hal-hal yang bertentangan khilafah. HTI itu bukan agama tapi ormas dan segala macem, lalu diiringi dengan dalil-dalil. Kalau kemudian Lakpesdam PBNU bisa memproduksi dan kebetulan gus-gus itu masih bisa mentransformasi, itu saya kira

menjadi strategi lain untuk membawa kepada moderasi.

Kalau di level ASN (Aparat Sipil Negara) sendiri, seharusnya menjadi garda terdepan menjaga ideologi negara, namun tak sedikit yang justru mendukung gerakan anti Pancasila?

Kalau dulu kenapa ASN atau penyelenggara negara berhasil menjadi benteng negara, karena sistem doktrin monoloyalitas. Pegawai negeri harus masuk golkar, pegawai negeri harus pancasila itu. Ada semacam ketakutan dan kontrol ketat. Begitu kran demokrasi dibuka pasca reformasi, sistem itu tidak berlaku dan menjadi sangat bebas. Bahkan masjid-masjid di BUMN, mayoritas diisi oleh kelompok-kelompok islamisme itu. Jadi, hingga hari ini proses keterlenaannya terlalu panjang dan sudah terlalu lama.

Menghadapi situasi ini, kita membutuhkan identifikasi, beragam strategi, hingga membangun sinergi antar kalangan moderat. Kantong kantong proses sosialisasi yang secara terang terangan mau menumbangkan pancasila atau mengganti pancasila itu masih begitu mudah ditemukan. Sebagaimana Gus Dur sampaikan, ideologi memang tidak bisa diadili, dan bahkan menurut saya dibubarkan pun, belum tentu akan bubar dan hilang ideologinya. Bisa saja hanya ganti nama dan bermetamorfosis. Dengan kata lain, saya ingin katakan, ini urusan *mindset*, ini urusan tentang *consciousness* dan tantangannya adalah *battle of mind*, kita

sedang mengalami peperangan terhadap pikiran, dan pikiran tidak bisa dicetak dalam waktu sehari.

Dulu Clifford James Geertz tahun '69 membandingkan antara Maroko dan Indonesia. Dia sampaikan konsep *religiousness* dan *religious-mindedness*. *Religiousness* itu orang yang cara keberagamaannya dirangkul oleh teks, jadi kelompok tekstualis itu buahnya cenderung intoleran dan seterusnya. Sementara *religious-mindedness* itu, cara keberagaman sebaliknya, tidak hanya bergantung teks, tetapi juga melihat konteks yang merangkul agamanya. *Sholihun likulli zaman wa makan* itu menjadi penting bahwa teks itu tidak bisa kalau tanpa diaktualisasikan dengan satu perubahan zaman. Jadi ada *takwil* ada tafsir dan seterusnya. Maroko dulu bersifat *religiousness*, sementara Indonesia tahun 70an disebut *religious-mindedness*. Namun sekarang jadi terbalik, Indonesia jadi *religiousness* Maroko secara pelan pelan merangkak menuju *religious-mindedness*. Nah bagaimana perubahan itu bisa terjadi? Itu cerita yang pasti sangat panjang.

Contoh kecil saja, ada saudara saya yang *ngomong, loh* mas sampean itu ternyata di deputi pancasila ya? Kenapa? Lho pancasila itu *kan* bagi orang orang Islam masih dipermasalahan. Lho kok sampean malah deputi di situ? Saya malah jawab, justru banyak yang mempermasalahan seperti sampean itu saya harus jadi deputi. Banyak orang yang cara berfikirnya seperti contoh di atas. Hampir semua lini mengalami

suatu keawaman di dalam dirinya. Tidak sedikit orang yang bicaranya mengutip ayat yang masih *grotal-gratul*, tapi dengan *pede* menyampaikan dan memprotes di depan tokoh dan ulama yang secara keilmuan, kedalaman, dan *background* pendidikannya otoritatif dalam agama. Tanpa konfirmasi, atau bertanya, dan seolah merasa paling benar pendapatnya. Ironi sekarang, kaum tekstualis yang hanya memiliki pengetahuan sejengkal aja sudah berani melawan kiai, dan para kiai panutan banyak yang tidak mendapat porsi tampil di layar TV. Ini tentu menambah kerumitan tersendiri.

Masih terlalu banyak ruang yang kemudian melahirkan bibit isme yang sempit. Di singapura jelas, orang yang berkhotbah sekali saja tentang takfiri tangkap, *hate speech*. Di sini masih sangat terbuka. Jadi, tidak ada cara lain kita harus pelan-pelan melakukan perubahan, kampanye penyadaran dalam bentuk *religious-mindedness*.

Kesimpulannya, *pertama*, bahwa sekarang ini kita tidak membutuhkan data lagi tentang kecenderungan apa yang disebut *religiousness* itu, dimana-mana data, di kalangan apapun, strata apapun, kelompok strategis manapun itu memberikan sinyal bahwa kelompok tekstualis itu dominan. *Kedua*, dengan mencuatnya kasus Ahok, sisi optimisnya muncul banyak reaksi pentingnya Pancasila. Sangat besar, setiap hari ada saja yang datang menyampaikan pentingnya penguatan Pancasila. Ada rektor UIN IAIN seluruh Indonesia bicara di Aceh, lalu pertemuan 100 Antropolog di UGM,

termasuk terakhir di Bali ada 3000-4000 pimpinan perguruan tinggi. Memang beragam reaksi itu hanya bersifat spontan, perlu tindak lanjut sistematis dan berkelanjutan. Pada gilirannya akan lahir tindak lanjut serius, jejaring dengan beragam mitra *well organized* yang dibutuhkan, termasuk upaya pemerintah untuk membangun strategi kebudayaan bagi penguatan Pancasila. Ke depan akan dirancang bagaimana memberikan info bagi generasi *mellenial* yang tidak pernah tahu Pancasila, aspek sejarah dan lain sebagainya. Mereka sudah diwarisi oleh sebuah konsensus bernegara dari para pendahulu, dan sudah mapan, kenapa hari-hari belakangan mau berfikir *setback*, memperntanyakan ulang atau justru mau mengganti yang sudah ada.

Bagi NU dan Muhammadiyah akan terus menyuarakan Islam itu *rahmatan lil'alamin*, Islam itu cinta damai dan seterusnya. Sehingga beragam isu kelompok-kelompok yang selalu setia kepada teks, yang akan membawa peristiwa dan situasi perang masa lampau, mau diputer pada situasi damai, zaman sekarang dengan berbagai distorsi dan bias yang dimainkan.

Apakah termasuk isu PKI yang dihembuskan?

Ya termasuk isu PKI. Ini *kan* misterius. Bagaimana PKI harus dihidupkan kembali tanpa fakta kongkrit, kayak hantu, seolah hanya diwacanakan sebagai sesuatu yang membuat masyarakat resah. Menarik kepada soal-soal gerakan Anti Tuhan (atheisme) di banyak forum dan

pengajian, agar mendapat dukungan bahwa pihak yang melakukan gerakan anti Tuhan ini begitu masif, padahal lebih banyak hanya rumor saja.

Melebih-lebihkan, menjadikan 'kambing hitam', otak-atik gatum. Istilah tolak pluralisme, tolak sekularisme tolak liberalisme, padahal *term* dan frase itu belum dimengerti. Ini yang dimainkan di kalangan masyarakat awam, sehingga semua terbawa arus oleh tokoh-tokoh panutan mereka. Dalam pengajian-pengajiann itu selalu saja muncul soal halal-haram, tapi tidak pernah misalnya menceritakan bagaimana agama itu bisa menjadi etos kerja, ruh dan penyemangat bagi aktivitas positif.

Misalnya Korea dengan semangat *Minjok* atau di China dengan *Dao, Ren, Xin, Li*, dan *De* nya. Sementara di Islam juga tidak kurang. Banyak spirit yang layak dimunculkan agar ajaran agama menjadi penyemangat kerja. Misal membahas detil bagaimana kerugian orang yang tidak menggunakan waktu dengan baik dalam kajian Islam dan seterusnya.

Dulu, muncul keresahan bahwa Islam itu ibarat lahan yang kering bagi lahirnya kapitalisme, karena Islam memberikan kebebasan individu yang begitu luas. Padahal, orientasi akhirat seringkali begitu kuat sehingga urusan dunia dianggap main-main saja. Nah, semangat keseimbangan ini kan harus terus dikuatkan bagi kebaikan hidup dunia-akhirat. Dalam konsep confusius China juga muncul bahwa kaya itu tidak mulia. Lalu mereka mengoreksi dengan

gerakan neo-confisius menjadi kaya itu mulia yang dalam perkembangan konteks teori sosial disebut sosial *capital, trust*, jaringan dan seterusnya.

Islam memberikan justifikasi atau rasionalisasi bahwa bekerja itu bagian dari ibadah, menggunakan waktu yang efisien adalah bagian dari sebuah jihad, dan seterusnya. Dalam survey 51 negara, Indonesia menempati nomor 2 dari belakang dalam hal budaya membaca. Padahal dalam al Qur'an ayat pertama itu perintah membaca. *Iqro' bismirobbika lladzi kholaq*, berarti Qur'an harus diganti dong? Karena orang Indonesia mayoritas tidak membaca, bisa begitu kan? Terus terang saya termasuk orang yang sangat resah dengan perkembangan semacam ini. Prof. Syafi'I Maarif pernah menyampaikan bahwa tanah di Indonesia itu 80% dikuasai asing, 13% oleh konglomerat Indonesia, dan hanya 7% yang dimiliki masyarakat. Ada orang yang kekayaannya bisa mencapai 5 juta hektar dan seterusnya dalam neokolonialisme.

Dalam bidang keagamaan juga tak sedikit muncul pesimis, tapi kita harus terus melakukan upaya dan langkah dalam membangun optimisme. Terlebih kita bicara bonus demografi dalam beberapa tahun ke depan. Apakah generasi mendatang siap dengan berbagai skill dan latar belakang pendidikan dalam menyongsong bonus demografi? 70% kita akan memiliki angkatan kerja yang umurnya 14 tahun sampai 64 tahun produktif, tapi mayoritas lebih dari 51% tamatan SD, dan SMP.

Bicara Qatar saja, beberapa tahun yang lalu sempat pergi ke Qatar dan berbincang dengan Ketua MPR-nya, waktu itu jumlah penduduknya sekitar 1,3 juta. Yang asli Qatar hanya 300 ribu, selebihnya isinya India, Philipina, dan Indonesia itu paling kecil. Kebanyakan dalam bidang-bidang yang disebut sebagai kelas menengah jasa dan segala macamnya. Sementara Indonesia kebanyakan di sektor asisten rumah tangga. Pegawai negeri di sana sangat sejahtera, dari pesawat sudah kelihatan rumah pegawai negeri, sudah ada mobil dan kolam renang.

Muncul pandangan bahwa Pancasila bertentangan dengan Islam, bagaimana merubah *mindset*?

Salah satu caranya adalah pernyataan bahwa pancasila sama dengan piagam Madinah yang dilaksanakan Nabi SAW. Tetapi tidak seluruh umat bisa terima, apalagi kelompok-kelompok ekstrem. Yang ingin saya katakan bahwa Islam itu ya beragam, jadi tidak usah dihadapkan saja, dia sudah berhadapan dengan Pancasila, karena dianggap pancasila itu bukan agama, tapi ini sekuler.

Seperti pandangan Pancasila dalam tesis Riziq Shihab itu. Saya baca dan melihatnya dia mau protes kenapa Islam tidak diakomodir oleh Pancasila. Dia mengutak-atik perdebatan soal Piagam Jakarta, hingga di akhir kesimpulannya, saya menangkap seolah-olah Islam tidak diakomodir oleh Pancasila.

Yang menarik dalam perdebatan Pancasila itu, sebenarnya usulan dari muhammadiyah yang disampaikan Bagus Hadikusuma. Beliau tidak setuju dengan Piagam Jakarta meskipun alasannya berbeda. Trus Bung Karno sendiri, katanya dulu sudah membujuk orang nasionalis untuk menerima Piagam Jakarta. Namun bujukan itu sudah didahului oleh Bung Hatta, juga sudah didahului kelompok-kelompok yang melakukan pertemuan di Bali, rumahnya AA Maramis. Sebenarnya terjadi negosiasi macam-macam, termasuk kiai Wahid Hasyim yang kemudian mendefinisikan Ketuhanan yang Maha Esa, dimaknai sebagai sesuai dengan Islam.

Nah karena itu, menurut saya, pada waktu itu bisa disebut momentum hadiah kedewasaan Islam. Kalau tidak begitu, kemerdekaan kita akan menimbulkan perpecahan di bagian timur dan utara Indonesia. Konflik terkait sejarah ini akan abadi, Pancasila dengan segala macamnya, akan terus menghambat sampai ketika kita menyadari betul bahwa sebenarnya Islam itu tidak bertentangan dengan Pancasila.

Kita harus mengatakan itu bahwa Islam tidak bertentangan dengan pancasila, dan untuk menyampaikan bahwa Islam tidak bertentangan dengan pancasila itu butuh kepiawaian tekstual. Ulama yang piawai terkait tekstual dan kontekstual perlu diperbanyak. Sebab tanpa kemampuan seperti itu, mereka akan dengan mudah menuduh sebagai antek kapitalis, antek ini dan lain sebagainya.

Nah, Bagaimana membuat orang melupakan perdebatan, menaikkan satu level, spirit agama menjadi etos kerja?

Seharusnya perdebatan semacam itu sudah selesai. Kalau tidak, ya kita hanya mengulang perdebatan abad pertengahan, mengulang sejarah dan tidak beranjak ke depan. Lalu sampai pada apa yang disampaikan Einstein, *Science without religion is lame, religion without science is blind*. Nah, sekarang ini kita ada dalam kalimat yang kedua, bahwa agama tanpa sains, ini nanti bisa dibayangkan.

Saya bukan ahli ekonomi, tapi kalau pertumbuhan dasarnya hanya mengandalkan pajak, lalu logikanya ada sumber daya alam, begitu SDA habis, pajak menurun, *nggak* ada satu investasi segala macam, maka *kolaps* kita. Kalau sudah kolaps, ideologi provokasi itu akan mudah ditangkap sebagai seolah olah ada jalan keluar yang tidak Pancasila, dan akhirnya secara dramatis akan pecah dan bisa perang saudara. Itu yang paling mengerikan dalam pandangan saya.

Sekarang, sejak pagi-pagi ini kita mencegah agar itu tidak terjadi. Kalau kita mau belajar dari China atau India, satu langkah awal yang paling habis-habisan dilakukan adalah perbaikan SDM. Coba kalau *sampean* pergi ke Amerika atau Inggris, di bidang sains, isinya hanya China sama India, mereka mempersiapkan yang luar biasa. India dan China dalam waktu sekian tahun, sudah ada 3000 PhD dalam bidang sains. Dulu program yang dilakukan

Pak Habibi itu sebenarnya bagus banget, menyekolahkan anak-anak terpilih ke sainstek. Sekarang juga ada pembaharuan dengan 6000 baesiswa, ini saya kira bentuk yang seharusnya dilakukan.

Malaysia juga melakukan hal yang sama, mereka bisa menyalip kita. Dulu tahun 70an banyak orang Malaysia belajar teknik kulit di Jogja, kedokteran dan segala macamnya. Saya pernah di Jepang, daerah yang sangat terisolir, banyak orang Malaysia yang kuliah di sana. Begitu juga bila membandingkan di Australia dan lain-lain.

Jadi, Indonesia harus menyambut masa depannya, kalau tidak dilakukan maka tanda tanya besar. Nah, pesantren juga harus disiapkan model-model madrasah yang siap menyambut masa depannya. Kasus yang dilakukan oleh Kemenag, saya bisa ceritakan, awalnya tak sedikit yang ragu bahkan menyampaikan kekhawatiran menjadi beban, untuk memasukkan anak pesantren ke ITB dan universitas lainnya. Tapi begitu dicoba, ternyata dari 8 anak pesantren, 6 diantaranya lulus hampir *cumlaude*.

Sejauh dikasih peluang, ada keberpihakan pada kelompok minoritas yang tidak berdaya, ternyata memberi dampak positif. Tapi ada yang kurang menggembarakan, begitu mahasiswa jadi dokter dan teladan, tak sedikit yang terbawa masuk kelompok ekstrem. PR (pekerjaan rumah)nya masih banyak, tapi langkah yang dilakukan Lakpesdam PBNU, dan ini terus dilakukan dari periode ke periode, dengan memberikan pelatihan bagi calon kyai (gus-gus) pesantren, saya

kira bagian dari langkah antisipasi itu. Sekecil apapun, kita harus terus mencoba untuk melukis masa depan.

Banyak kalangan luar memuji Pancasila, bahkan tak sedikit yang studi banding dan menyebut bangsa ini beruntung, tanggapan Bapak?

Kita masih terus berupaya bagaimana Pancasila itu bukan daftar keinginan, tapi daftar kebutuhan. Itu yang masih sulit, kalau hanya keinginan *gampang* sekali. Tapi kalau untuk menjadi butuh, kita akan terus memperjuangkan. Ini juga banyak disampaikan berbagai kalangan, termasuk kalangan gereja dengan menyebut, Tuhan memberikan kebutuhan bukan keinginan. Kalau istilahnya di kalangan intelijen, katanya Pancasila itu seperti bintang dilihat pada waktu siang, *nggak* kelihatan karena sudah terang benderang. Kalau kita *nggak* ada konflik, Pancasila itu gak kelihatan, tapi begitu gelap, maka bintang-bintang itu akan kelihatan.

Maka mari kita hidupkan bintang-bintang di mana saja, layaknya kunang-kunang, kalau jumlahnya jutaan, maka akan menjadi terang. Kalau kunang-kunang sendirian ya tidak akan kelihatan. Yang lebih menarik, yang namanya bintang itu tidak ada persaingan, bintang yang satu tidak akan menyerap cahaya bintang yang lain, itu yang lebih penting. Jadi sudahlah, mau berlatar belakang apapun, ayolah seluruh elemen bangsa ini menghidupkan bintang-bintang. *Fastabiqul khoirot*, tanpa harus sikut sikutan.